

REPRESENTASI AKUNTABILITAS PRESIDEN MEGAWATI DALAM PEMBERANTASAN KKN :ANALISA SEMIOLOGI KOMUNIKASI TENTANG REPRESENTASI AKUNTABILITAS PRESIDEN MEGAWATI DALAM PEMBERANTASAN KKN DI HARIAN KOMPAS, REPUBLIKA DAN MEDIA INDONESIA

Sigit Tripambudi
Th.2004

ABSTRAK

Di antara kriteria sebuah demokrasi secara empiris adalah akuntabilitas pemegang kekuasaan dan kebebasan pers. Akuntabilitas menyangkut pertanggung-jawaban pemegang kekuasaan terhadap apa yang akan, sedang dan telah dilakukan seorang pemegang jabatan publik. Sedangkan kebebasan pers tersebut dalam arti bagaimana kesempatan media dapat mengontrol pelaksanaan sebuah pemerintahan.

Sementara itu masalah pemberantasan KKN menjadi permasalahan besar bangsa Indonesia. Rapuhnya struktur kehidupan bangsa ini yang ditandai dengan krisis multidimensi sejak pertengahan tahun 1997 merupakan akibat praktik KKN yang terjadi hampir di seluruh sisi kehidupan. Setelah reformasi, pemberantasan KKN adalah wajib bagi setiap pemegang kekuasaan publik, dalam hal ini adalah presiden. Setelah pemerintahan transisi Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang terhenti di tengah jalan, naiknya Presiden Megawati merupakan "harapan baru" dalam pemberantasan KKN. Pada awal masa jabatannya Megawati menyampaikan komitmennya untuk memberantas KKN di depan DPR yang merupakan wakil rakyat. Artinya komitmen itu disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dari sinilah muncul pertanyaan bagaimana Kompas, Republika dan Media Indonesia merepresentasikan akuntabilitas Presiden Megawati dalam pemberantasan KKN.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan analisa semiologi komunikasi, yaitu penafsiran yang menekankan pada aspek apa maksud komunikator menyampaikan pesan. Operasionalnya menggunakan 9 formula yang mencakup : siapa komunikator; motivasi komunikator; konteks fisik dan sosial: struktur landa dan tanda lain; fungsi tanda. sejarah dan mitologi: intertekstualitas intersubjektivitas; common sense dan penjelajahan ilmiah peneliti.

Berdasarkan korpus-korpus yang diambil dari Kompas, Republika dan Media Indonesia edisi Agustus 2001, 2002 dan 2003; penelitian ini menemukan bahwa pada awalnya ketiga surat kabar tersebut merepresentasikan Presiden Megawati cukup akuntabel dalam upaya untuk memberantas KKN. Hal ini sebagai harapan baru media akan adanya sebuah pemerintahan yang bersih dan KKN. Oleh karena itu media "membombong" Megawati dan menyerukan untuk menghargai serta mendukung keinginan Presiden tersebut agar Presiden lebih bersemangat. Selain itu media juga mengmgatkan Presiden Megawati agar komitmennya untuk memberantas KKN tidak sekedar retorika.

Dalam perkembangannya, harapan media tersebut tidak pernah terwujud sehingga media merepresentasikan Presiden Megawati tidak akuntabel dalam pemberantasan KKN. Presiden Megawati inkonsisten dengan komitmen di awal masa jabatannya. Inkonsistensi presiden tersebut meliputi inkonsistensi terhadap penegakkan hukum, inkonsistensi terkait bisnis keluarga dan Presiden Megawati yang mencari selamat dengan mengkritik sebelum dikritik. Harapan media terhadap Presiden Megawati untuk memberantas KKN dikecewakan karena pemberantasan KKN hanya sekedar retorika.